

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 26
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Ketua KASN 2. Kepala BKN 3. Kepala LAN 4. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI 5. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI 6. Direktur Eksekutif APKASI 7. Direktur Eksekutif APEKSI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 22 Februari 2016
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Membahas Masalah tenaga honorer
Ketua Rapat	: Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 33 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Senin, 22 Februari 2016 dibuka pada pukul 11.15 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan Pembahasan masalah tenaga honorer.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Ketua KASN, Kepala BKN, Kepala LAN, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan.

II. KESIMPULAN

- A. Komisi II DPR RI meminta pemerintah (Kementerian PAN RB dan Kemenkumham) untuk memberikan payung hukum terkait penyelesaian masalah pengangkatan tenaga honorer kategori II dengan membuat beberapa opsi, yaitu:

1. Revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundangan lainnya yang terkait: atau
 2. Peraturan perundangan lain yang memungkinkan untuk memberikan payung hukum terkait pengangkatan tenaga honorer kategori II
- B. Komisi II DPR RI dan Kementerian Keuangan sepakat untuk mendukung pendanaan untuk rekrutmen tenaga honorer kategori II melalui dukungan anggaran tahun 2016 melalui mekanisme realokasi anggaran atau pengajuan tambahan pagu di dua lembaga yaitu Kementerian PAN RB dan BKN atau alternatif penyelesaian lainnya yang diprioritaskan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- C. Komisi II DPR RI meminta LAN untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai kebutuhan Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- D. Komisi II DPR RI meminta pemerintah (LAN) agar dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya Aparatur Sipil Negara sehingga dapat memenuhi kompetensi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, berikut simulasi kebutuhan anggaran terhadap pra jabatan dan peningkatan kapasitas tenaga honorer kategori II.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.55 WIB.

Jakarta, 22 Februari 2016
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

ttd

Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si
A-39